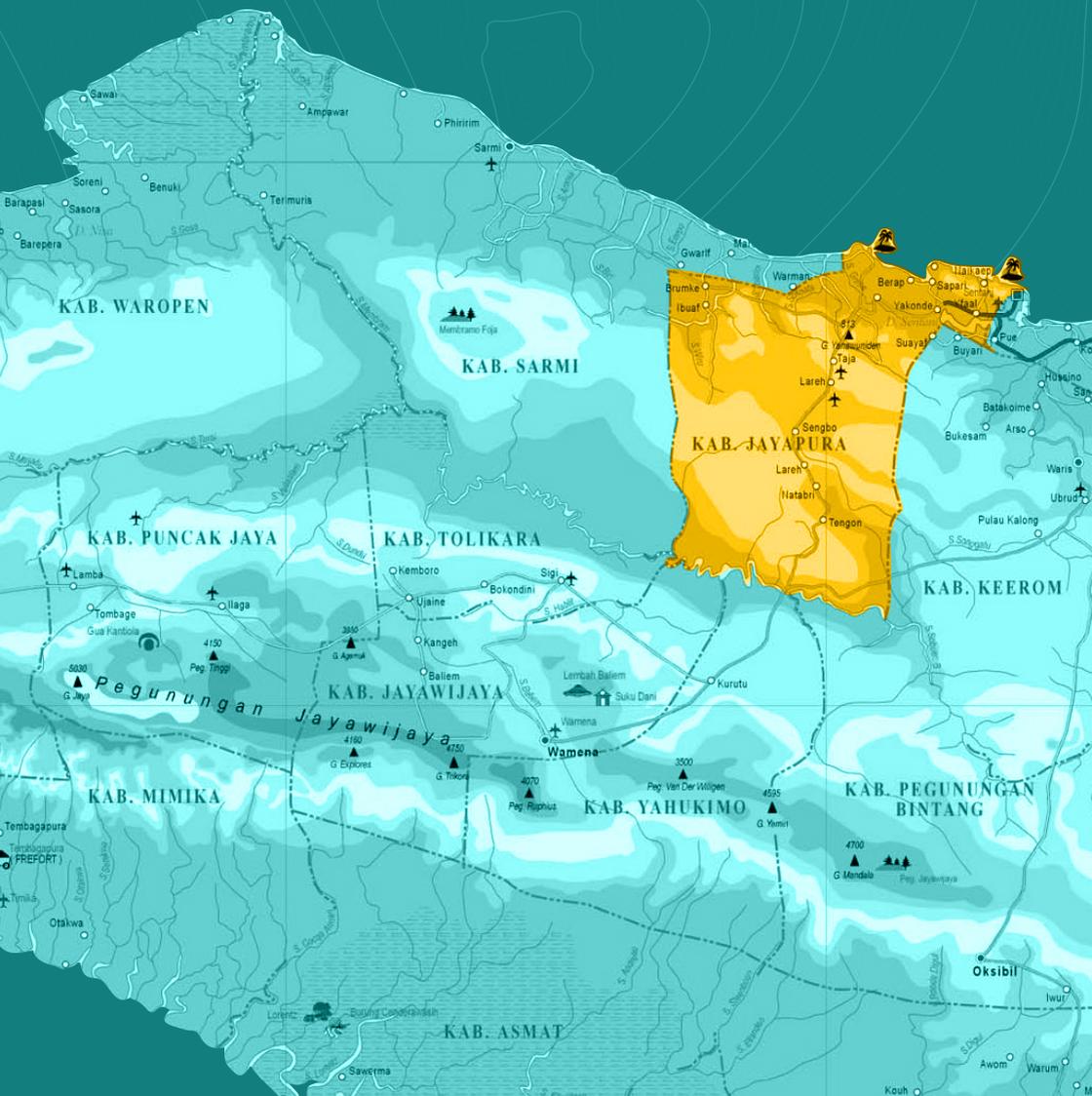


KEMAJUAN PENINGKATAN KAPASITAS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2018

dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Satu Peta





Kebijakan satu peta memungkinkan terwujudnya alur pengelolaan lahan yang baik dengan menyediakan dan mengelola satu basis data yang dapat digunakan dalam berbagai tahapan pengelolaan bentang lahan

Konteks Kebijakan



Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Skala 1:50.000 Dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2016

PERPRES
NO. 9 TAHUN 2016

Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

(Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016)

Perpres No. 9/2016 memuat amanat-amanat berikut:



Kewajiban dan Mekanisme Penganggaran untuk Kebijakan Satu Peta



Struktur Organisasi, Tugas & Wewenang Kelembagaan Kebijakan Satu Peta serta Mekanisme Kerja pada skala makro



Rencana Aksi yang disepakati dan dipatuhi oleh para pemangku kepentingan



Kegiatan Utama Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Kegiatan Utama Kebijakan Satu Peta



KOMPILASI

Proses pengumpulan Informasi Geospasial (IG) Tematik yang dimiliki oleh Kementerian/ Lembaga saat ini



INTEGRASI

Proses penyelarasan IG Tematik, baik yang telah dimiliki oleh Kementerian/ Lembaga maupun yang baru dibuat, terhadap IG Dasar



SINKRONISASI

Proses penyelarasan antar IG Tematik, termasuk didalamnya penyelesaian konflik yang terjadi akibat tumpang tindih hasil Integrasi

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP)

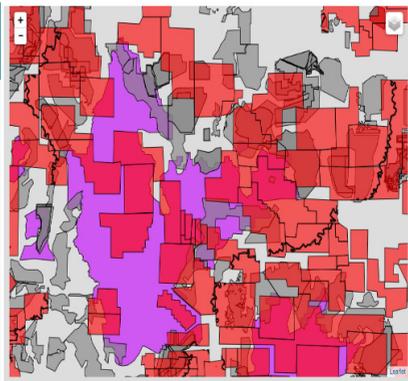
Tujuan: percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang mengacu pada **satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal**

Fungsi: a. acuan data IGT (Informasi Geospasial Tematik) pada masing-masing sektor; dan b. acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.



Hasil yang diharapkan KSP

- 1 Mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan dan batas daerah
- 2 Mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan, baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur
- 3 Mempermudah dan mempercepat proses percepatan penerbitan perijinan yan terkait dengan pemanfaatan lahan
- 4 Mempermudah pelaksanaan simulasi yang menggunakan peta seperti mitigasi bencana, menjaga kelestarian lingkungan serta keperluan pertahanan
- 5 Meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktifitas ekonomi karena hal ini dapat memberikan kepastian usaha



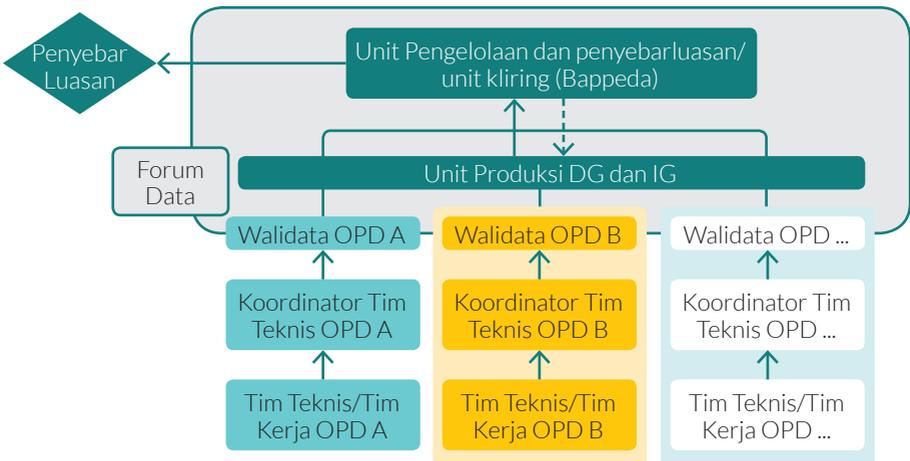


Dibawah **koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, Kabupaten Jayapura telah menginisiasi dibentuknya Peraturan Bupati yang mengatur proses percepatan kebijakan satu peta dengan mengacu kebijakan di tingkat provinsi dan nasional

- Finalisasi **kelembagaan simpul jaringan** Kabupaten Jayapura
- Pembahasan mengenai **struktur dan proses kerja** yang mewakili setiap pelaku dalam membangun basis data geospasial secara kolaboratif
- Mendorong **penyusunan peta jalan kebijakan satu peta di Kabupaten Jayapura** untuk pembangunan berkelanjutan yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan di tingkat Kabupaten Jayapura
- Merevisi dan mensosialisasikan **prosedur operasi standar** mengenai tugas dan fungsi masing-masing unsur di dalam kelembagaan simpul jaringan
- Mengidentifikasi dan mengusulkan **bentuk insentif** bagi para anggota kelembagaan untuk meningkatkan motivasi kerja



Struktur Kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Jayapura



Peran dan Fungsi Kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Jayapura

No	UnsurPelaksana	Pihak Terlibat	Peran dan Fungsi
1	Pengarah dan Penanggung jawab	Bupati	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan JIGD dalam mendukung Kebijakan Satu Peta • Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan JIGD dalam mendukung Kebijakan Satu Peta
2	Ketua Tim Simpul Jaringan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JIGD yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis • Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan JIGD kepada Bupati
3	Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan DG & IG	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan data yang dikelola di dalam portal data simbangda Kabupaten Jayapura • Pengamanan data yang dikelola di dalam portal data simbangda Kabupaten Jayapura • Verifikasi data yang dikelola di dalam portal data simbangda Kabupaten Jayapura • Penyebarluasan data yang dikelola di dalam portal data simbangda Kabupaten Jayapura • Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan pengelolaan portal data simbangda Kabupaten Jayapura kepada ketua tim simpul jaringan; dan • Terlibat dalam setiap tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi, dan pemanfaatan data dalam pengelolaan portal data simbangda Kabupaten Jayapura
4	Unit Produksi DG & IG	Setiap OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan data geospasial yang akan dikelola dalam penyelenggaraan JIGD • Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data geospasial di dalam portal simbangda sesuai dengan ketentuan • Menyampaikan data geospasial kepada Unit Kliring • Terlibat dalam setiap tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi, dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan JIGD

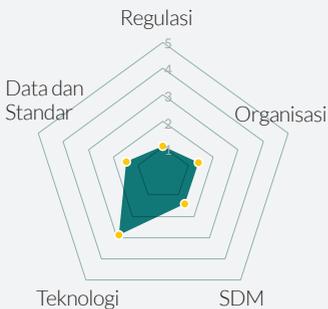
No	UnsurPelaksana	Pihak Terlibat	Peran dan Fungsi
		Unit Produksi DG & IG terdiri atas 3 unsur pelaksana, yaitu:	
		1. Walidata, adalah Kepala OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan persetujuan penyebarluasan data geospasial dan menyampaikan data geospasial kepada Unit Kliring • Memutuskan klasifikasi aksesibilitas publikasi data geospasial yang dikelola sesuai ketentuan • Bertanggung jawab atas kualitas dan kesahihan data geospasial yang diproduksi pada masing-masing Unit Produksi
		2. Koordinator tim Teknis PD, adalah Kepala Sub-Bidang Program pada masing-masing OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan teknis dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data pada setiap Unit Produksi • Melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada walidata
		3. Tim Teknis PD, adalah staf yang ditunjuk oleh walidata pada masing-masing PD	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tahapan teknis dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data
5	Forum data	Forum data Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan diskusi antar pihak terkait integrasi dan penyesuaian data IGT hasil kompilasi terhadap data IGD dan memastikan kesesuaian antara data IGT dengan data IGD • Menyelenggarakan diskusi analisa tumpang tindih, identifikasi tipologi permasalahan data, dan diskusi penyesuaian antar data IGT yang saling berkaitan serta memastikan kesesuaian antar data IGT • Menyelenggarakan diskusi para pihak untuk merumuskan solusi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan data IGT hasil sinkronisasi
6	Pengguna DG & IG	Pemerintah dan publik yang memanfaatkan data yang dikelola di dalam Portal data simbangda Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan data yang dikelola di dalam portal simbangda sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Note: Peran dan fungsi diambil dari lampiran draft perbup baru yang berupa Standar Operasional Prosedur



- Pelatihan dalam bidang teknologi informasi terutama dalam pengelolaan dan pemeliharaan geoportal dan system informasi yang dibangun
- Pelatihan sistem informasi geografis untuk menunjang pengelolaan data geospasial
- Pelatihan pengelolaan basis data menggunakan tools/ alat bantu yang dibangun untuk melakukan proses kompilasi, integrasi dan sinkronisasi
- Pelatihan pemanfaatan data spasial terstandar untuk proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan lahan

Hasil Penilaian Pengembangan Kapasitas Kabupaten Jayapura



Pilar JIGD	Level	GAP
Regulasi	1.056	3.944
Organisasi	1.392	3.608
SDM	1.404	3.596
Teknologi	2.875	2.125
Data dan Standar	1.500	3.500

Hasil Penilaian Pengembangan Kapasitas Kabupaten Jayapura

Pelatihan pengembangan Basis Data Geospasial untuk Implementasi Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Jayapura:

- Pengenalan Konsep dasar Sistem Informasi Geografis
- Pelatihan penggunaan perangkat lunak *open source* QGIS untuk pengolahan data geospasial
- Pengenalan Portal data Simbangda Kabupaten Jayapura (<http://simbangda.jayapurakab.go.id>)
- Pelatihan proses kompilasi: upload data, isi metadata, georeferensi dan topology data

Rencana penguatan kapasiatan lanjutan:

- Penguatan kapasitas penggunaan Portal data Simbangda Kabupaten Jayapura
- Penguatan kapasitas kompilasi data geospasial
- Penguatan kapasitas integrasi data geospasial
- Penguatan kapasitas sinkornisasi dara geospasial



- Melakukan peningkatan aktifitas portal simbangda Kabupaten Jayapura (<http://simbangda.jayapurakab.go.id>)
- Pengembangan alat bantu untuk proses teknis kompilasi, integrasi dan sinkronisasi (<http://simbangda.jayapurakab.go.id:3838/onemap/>)
- Penyediaan perangkat lunak tak berbayar (open source) untuk mempermudah proses pengelolaan data spasial



- Penyusunan daftar katalog data perencanaan penggunaan lahan sebanyak 101 data serta informasi aksesibilitas pada tiap data
- Mendorong kelengkapan metadada dan standarisasi KUGI sesuai dengan standar nasional
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berbagi-pakai data sesuai dengan konteks Kabupaten Jayapura dan ketentuan serta aturan yang berlaku saat ini

Kondisi Ketersediaan dan Aksesibilitas Data Perencanaan Penggunaan Lahan Kabupaten Jayapura

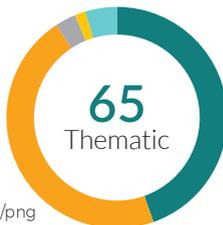
IGT Data Availability

■ .shp ■ tabular
■ .jpg/png ■ (blank)

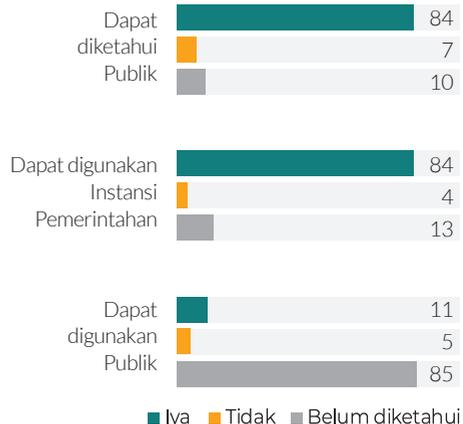


Land Use Planning Data Availability

■ .shp ■ tabular
■ teks dokumen ■ .jpg/png
■ (blank)



Jumlah data menurut aksesibilitas



Daftar Data Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Jayapura

No.	Informasi Geospasial Tematik (IGT)	No.	Informasi Geospasial Tematik (IGT)
1	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000	24	Peta Bagian RZWP3K skala 1:50.000
2	Peta Penutup Lahan skala 1: 50.000	25	Peta Jenis dan Kekayaan tangkap di Kabupaten skala 1:250.000
3	Peta Perda Tanah Ulayat, minimal pada skala 1:50.000	26	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000
4	Peta Hak Guna Usaha, minimal pada skala 1:50.000	27	Peta Sebaran Pelabuhan Penyebrangan skala 1:50.000
5	Peta Hak Pengelolaan, minimal pada skala 1:50.000	28	Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000
6	Peta Hak Guna Bangunan, minimal pada skala 1:50.000	29	Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000
7	Peta Penggunaan Tanah skala 1:50.000	30	Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun KA skala 1:50.000
8	Peta Izin Lokasi, minimal pada skala 1:50.000	31	Peta Jaringan Serat Optik, skala 1:50.000
9	Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB)	32	Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala 1:50.000
10	Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), minimal pada skala 1:50.000	33	Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50:000
11	Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah skala 1:250.000	34	Peta Sebaran Lokasi SPAM skala 1:50.000
12	Peta RKPD skala 1:250.000	35	Peta Air Tanah skala 1:50.000
13	Peta Perda RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan Perda RTRW Kota skala 1:25.000	36	Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000
14	Peta Batas Administrasi Kabupaten/ Kota skala 1:50.000	37	Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:50.000
15	Peta Batas Administrasi Desa/ Kelurahan skala 1:10.000	38	Peta Sawah Beririgasi skala 1:5.000
16	Peta Jalan Nasional skala 1:50.000	39	Peta Lahan Sawah skala 1:50.000
17	Peta Jalan Tol skala 1:50.000	40	Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000
18	Peta Jalan Provinsi skala 1:50.000	41	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000
19	Peta Jalan Kabupaten 1:50.000	42	Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerentanan Gerakan tanah skala 1:50.000
20	Peta Kawasan Industri Eksisting skala 1:50.000	43	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami
21	Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000	44	Peta Potensi Desa (sosial-ekonomi), minimal pada skala 1:50.000
22	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000	45	Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000
23	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000		

No.	Informasi Geospasial Tematik (IGT)
46	Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya, skala 1:50.000
47	Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan skala 1:50.000
48	Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan skala 1:50.000
49	Peta Persebaran Perkebunan skala 1:50.000
50	Peta Sistem Lahan (Morfologi) skala 1:50.000
51	Daftar Komoditas, Sebaran Areal, dan Produksi Pertanian
52	Jumlah Ketersediaan Pangan per Tahun
53	Daftar dan Sebaran Industri Pengolahan Hasil Pertanian pangan
54	Daftar Komoditas, Sebaran Areal, dan Produksi Hortikultura
55	Daftar dan Sebaran Industri Pengolahan Hasil Hortikultura
56	Daftar dan Sebaran Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
57	Daftar Kasus Wabah Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
58	Peta Batas Administrasi Kecamatan
59	Daftar dan Sebaran Industri Rumah Tangga
60	Daftar dan Sebaran Industri Mikro
61	Daftar dan Sebaran Industri Kecil
62	Daftar dan Sebaran Industri Menengah
63	Daftar dan Sebaran Industri Besar
64	Daftar dan Sebaran Jenis Bangunan Pasar
65	Daftar Perusahaan dan Status Izin Usaha per Sektor
66	Daftar dan Sebaran Lokasi Obyek Wisata
67	Digital Elevation Model (DEM)
68	Garis Ketinggian/Kontur
69	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
70	Jumlah Cadangan Karbon per Tutupan dan Penggunaan Lahan

No.	Informasi Geospasial Tematik (IGT)
71	Indeks Kualitas Lingkungan
72	Daftar dan Sebaran Lokasi Pencemaran Lingkungan
73	Daftar Kawasan Lindung
74	Sebaran Lokasi Wisata Geologi
75	Citra satelit resolusi rendah (> 30 m)
76	Citra satelit resolusi sedang (5 - 30 m)
77	Citra satelit/foto udara resolusi tinggi (< 5 m)
78	Perubahan Penggunaan dan Tutupan Lahan
79	Jaringan Sungai
80	Areal Sempadan Sungai
81	Daftar dan Sebaran Danau Alami
82	Sebaran Lokasi Ibukota Kabupaten
83	Sebaran Lokasi Ibukota Kecamatan
84	Sebaran Lokasi Kelurahan/Desa
85	Sebaran Pulau Besar dan Kecil
86	Kepadatan Penduduk
87	Pertumbuhan Penduduk
88	Daftar dan Sebaran Lokasi Jembatan
89	Peta Sebaran Permukiman
90	Peta Kawasan Strategis Kabupaten
91	Peta Lahan Kritis
92	Peta Potensi Konflik Lahan
93	Peta permasalahan hak Ulayat
94	Peta Sebaran Ternak
95	Peta Kampung ODF Bebas (BABS)
96	Peta sebaran aset pemerintah daerah
97	Peta Sebaran Kampung Berlistrik
98	Pemetaan Tanki Septik skala komunal
99	Peta Potensi Komoditas Perkebunan (Sagu, Vanili, Cacao, Kelapa)
100	Peta sebaran kelompok tani
101	Peta Jalan Lingkungan dengan drainasi

Rencana Tindak Lanjut

- Mendorong disahkannya Peraturan Bupati tentang kebijakan satu peta
- Mendorong ujicoba implementasi SOP penyelenggaraan DG dan IG serta berbagi-pakai DG dan IG
- Penguatan kapasitas penggunaan Portal Data Simbangda Kabupaten Jayapura
- Penguatan kapasitas kompilasi data geospasial
- Penguatan kapasitas integrasi data geospasial
- Penguatan kapasitas sinkornisasi data geospasial

Harapan

- Sistem pengelolaan data dan informasi yang komprehensif didukung dengan regulasi akan menghasilkan data dan informasi yang akurat dan terpercaya sehingga bisa tersedia untuk perencanaan terpadu dan dapat digunakan sebagai media pemantauan pembangunan
- Kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan dalam mewujudkan satu peta di Kabupaten Jayapura

World Agroforestry (ICRAF) adalah lembaga penelitian internasional yang berpusat di Nairobi-Kenya, dibentuk tahun 1978 dengan nama The International Centre for Research in Agroforestry atau disingkat ICRAF. ICRAF merupakan satu dari 15 lembaga penelitian internasional yang tergabung dalam jaringan the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). ICRAF mengembangkan agroforestry berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dipraktikkan petani. Melalui kegiatan penelitian dan kerjasama yang inovatif dengan berbagai mitra, kami mempersembahkan ilmu pengetahuan bagi petani dan pembuat kebijakan.

World Resources Institute (WRI) Indonesia

didirikan pada akhir 2014 dengan kantor pusat di Jakarta, WRI Indonesia berafiliasi dengan World Resources Institute, lembaga kajian lingkungan global di Wasingthom D. C. WRI memiliki jaringan penelitian yang beranggotakan lebih dari 450 tenaga ahli dan staf dilebih dari 50 negara. Di Indonesia, kami telah mengerjakan proyek bersama para mitra selama lebih dari 20 tahun, dan WRI Indonesia didirikan untuk membangun keberadaan dalam negeri yang kuat, membuat kemitraan formal, serta memperkuat penelitian lapangan.

Informasi lebih lanjut:

www.worldagroforestry.org
m.zulkarnain@cgiar.org



WRI INDONESIA